

## ABSTRAK

Kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yang bertujuan agar terciptanya masyarakat sejahtera. Tindakan pemerintah sangat berpengaruh pada keadaan setiap daerah khususnya kota Bandung terkait keefektifan penerapan kebijakan-kebijakan pemerintah kota Bandung untuk menangani fakir miskin. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Penerapan kebijakan Pemerintah kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial serta Faktor apa saja yang menjadi penghambat kebijakan Pemerintah kota Bandung dalam upaya penanganan fakir miskin.

Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan berhubungan dengan pembahasan. Penelitian ini berpijak pada penelitian deskriptif normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan berbagai literatur yang relevan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif artinya data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun data statistik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan kebijakan pemerintah Kota Bandung terhadap penanganan fakir miskin dapat dikatakan belum cukup efektif, karena masih adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dengan penerapannya yang mengakibatkan bertambahnya kembali angka kemiskinan di tahun 2018 serta terdapat faktor penghambat kebijakan Pemerintah kota Bandung dalam upaya penanganan fakir miskin yaitu pertama faktor masyarakat, pola pikir (*mindset*) dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kemapanan hidup yang masih rendah, sehingga tidak adanya keinginan yang kuat dalam diri setiap fakir miskin untuk hidup lebih berkembang dan mandiri. Kedua faktor penegak hukum, kurangnya penegakan hukum terkait pendampingan dan pengawasan terhadap upaya penanganan fakir miskin baik dalam hal pendataan fakir miskin maupun pengalokasian bantuan kepada fakir miskin yang mengakibatkan banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran. Ketiga faktor kebudayaan, pergaulan hidup masyarakat kota Bandung saat ini yang dapat dikatakan kurang baik, karena banyak terdapat mulai dari anak sekolah dasar sampai anak remaja yang sudah merokok, berpacaran dan pergaulan bebas lainnya.

Kata Kunci : efektivitas, pemerintah, penanganan fakir miskin

## **ABSTRACT**

*Government policy is an important thing in state's life that have a goal to create a safe people. government policy really have an effect especially in bandung from effectivity of practical of bandung government policies to handle the poor. based on that phenomena, then the problem in this research is how greate the effect from practical policy bandung government based on act year 2011 no 13 about handle the poor and regional rule year 2012 no 24 about the enforcement and handle safe social and inhibition that can make the bandung government policy in the effort to handle the poor.*

*Juridicial normatif is used in this research method, from the approachment of act that have link with the topic. this research is based on descriptive normative research, wich is law research method that done by studying literature or a secondary data. primary data in this research is a secondary data that refere to many relevant literatur. data that have been collected in this research is analyzed by juridicial qualitative that mean every data that have been acquired is sorted by qualitative to gain a clear problem that have been discussed without using mathematics formula or even statistic data.*

*The conclusion from this research is that practical of bandung government policy in handling the poor is not yet effective, because there are many policy is not match with the practical that affect the rising of the poor population number in 2018 and the occur of factor inhibitor bandung government policy in the handling of the poor. First, people mindset became one of the factor and low level of people mindset that create a low will from the poor to develop and independent. Second, law enforcement factor, less controll and less accompaniment from the law enforcement in the poor data collection and allocation of help to the poor that cause many program is miss targeted. Third, culture factor, the juvenile associaton that is not good, ciggarates is already became a culture from child to juvenile, dating and promiscuity.*

*Keywords: Effectivity, Government, Handle the Poor.*